JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan
Volume : 8 | Nomor 2 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-6238|
https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Analisis Pengaruh Pad Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sumatera Utara

Author:
Mahza Dumoli Ashadi Sitorus[1]
Yunita Sari Rioni[2]
Renny Maisyarah[3]

Afiliation:
Universitas Pembangunan Panca Budi[1,2,3]

Corresponding email:
mahzasitorus@gmail.com
yunita@dosen.pancabudi.ac.id
rennymaisyarah@dosen.pancabudi.ac.id

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Latar Belakang Masalah : Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintah di tingkat lokal. Belanja daerah mencakup sejumlah besar alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, pelayanan publik, dan banyak lagi. **Metode penelitian :** pedekatan penelitian ini adalah menggunakan metode kausal. Metode kausal ini bertujuan untuk pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara variabel. **Kesimpulan :** Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kontribusi pajak daerah tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal, melainkan lebih diarahkan pada pembiayaan belanja operasional dan belanja rutin pemerintah daerah.

Kata kunci: **PAD dan Belanja Modal**

1. Pendahuluan

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk membiayai berbagai program, proyek, dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintah di tingkat lokal. Belanja daerah mencakup sejumlah besar alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, pelayanan publik, dan banyak lagi. Alokasi anggaran belanja daerah melibatkan alokasi anggaran yang diperoleh dari pendapatan daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan sumber daya keuangan lainnya. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan dan proyek yang menjadi prioritas dalam rencana

pembangunan daerah. Program dan proyek yakni belanja daerah mencakup biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program-program pemerintah dan proyek-proyek pembangunan. Ini bisa meliputi pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, program sosial, dan lain-lain. Fungsi pemerintah yaitu belanja daerah mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah di tingkat lokal, seperti pelayanan publik, perlindungan lingkungan, pengaturan ekonomi, keamanan, dan administrasi pemerintahan. Dengan kata lain, ini adalah cara pemerintah daerah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya pembangunan lokal adalah salah satu tujuan utama belanja daerah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Hal ini mencakup investasi dalam infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan lapangan kerja. Pelayanan publik mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, transportasi umum, kebersihan, dan banyak lagi. Partisipasi masyarakat dimana dalam penganggaran partisipatif, pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan belanja daerah. Hal ini dapat memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi adalah belanja daerah harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Ini melibatkan pelaporan yang tepat waktu dan akurat tentang penggunaan anggaran serta audit untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peraturan. Menurut Rahmawati (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat dan hubungan dana perimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Belanja daerah memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan di tingkat lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan yang cermat terhadap belanja daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber terutama dari sumber pajak. Pendapatan asli daerah dikelola guna untuk melakukan belanja daerah. Belanja modal pemerintah mengacu pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah (baik pemerintah pusat, daerah, atau lembaga pemerintah lainnya) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik. Belanja modal pemerintah mencakup sejumlah sektor, termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, air minum, energi, serta proyek-proyek pembangunan lainnya. Beberapa contoh belanja modal pemerintah meliputi pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. Pembangunan gedung-gedung sekolah, universitas, dan fasilitas pendidikan lainnya. Investasi dalam fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat. Proyek air minum dan sanitasi untuk meningkatkan akses ke air bersih dan sanitasi yang aman. Investasi dalam pembangkit listrik, jaringan energi, dan infrastruktur energi terbaru. Pembangunan fasilitas umum seperti taman, perpustakaan, dan pusat olahraga. Belanja modal pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang. Keputusan mengenai belanja modal pemerintah seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, prioritas pemerintah, dan kemampuan keuangan pemerintah. Pembiayaan belanja modal pemerintah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk anggaran pemerintah, pinjaman, hibah, dan investasi dari sektor swasta. Dalam banyak kasus, pemerintah melakukan perencanaan anggaran yang cermat untuk memastikan

bahwa belanja modal yang dikeluarkan akan memberikan manfaat jangka panjang dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional atau lokal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Candra Gunantara (2014) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali", menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji simultan menunjukan bahwa PAD, DAU, dan Belanja Modal berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil uji moderasi menunjukan bahwa Belanja Modal memperlemah pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh pengalokasian pendapatan daerah untuk Belanja Modal tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga proyek yang dikerjakan bersifat mubazir. Maka dalam hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **""Analisis Pengaruh Pad Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara""**.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun identifikasi masalah yang peneliti peroleh dari uraian diatas adalah :

1. PAD di berbagai daerah mempunyai pendapatan yang berbeda disetiap tahunnya.
2. Belanja modal belum merata disetiap pemerintah daerah Sumatera Utara.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya pada Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal.

2. Studi Literatur

2.1 Public Stewardship Theory

Teori ini menekankan tanggung jawab fidusia pejabat pemerintah untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik. SAP dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik.

Prinsip-prinsip utama teori penatalayanan publik:

1. Akuntabilitas yaitu pejabat pemerintah bertanggung jawab kepada publik atas penggunaan sumber daya publik.
2. Transparansi yaitu informasi keuangan harus transparan dan dapat diakses oleh publik.
3. Efisiensi yaitu sumber daya publik harus digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan publik.
4. Efektivitas yaitu program dan kegiatan publik harus efektif dalam mencapai hasil yang diharapkan.

SAP diselaraskan dengan teori penatagunaan publik dengan mewajibkan penyusunan laporan keuangan yang memberikan gambaran yang wajar dan akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas pemerintah. Prinsip dan praktik akuntansi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Menetapkan standar pelaporan keuangan yang memungkinkan pengguna menilai kesehatan keuangan dan keberlanjutan entitas pemerintah.

Manfaat penerapan teori penatagunaan publik pada SAP :

1. Pengambilan keputusan yang lebih baik: Pejabat pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya publik ketika mereka memiliki akses terhadap informasi keuangan yang dapat diandalkan dan transparan.
2. Peningkatan akuntabilitas: Pejabat publik menjadi lebih akuntabel kepada publik ketika mereka diharuskan melaporkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan konsisten.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat: Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat ketika informasi keuangan transparan dan ketika pejabat pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik.

Pengungkapan informasi mengenai transaksi pihak berelasi, seperti transaksi antara entitas pemerintah dan pegawai atau pemasoknya. Menetapkan standar akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran liabilitas kontinjensi, seperti liabilitas yang timbul dari kewajiban pemulihan lingkungan atau tuntutan hukum. Menetapkan standar penyajian informasi keuangan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat.

Teori penatalayanan publik merupakan grand theory yang mendasari standar akuntansi pemerintahan. SAP dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik pengelolaan keuangan yang baik di sektor publik, konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan publik. Dengan menerapkan teori penatalayanan publik pada SAP, pemerintah dapat meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pedekatan penelitian ini adalah menggunakan metode kausal . Dimana metode kausal ini bertujuan untuk menguraikan sistematis tentang teori (bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil penelitian yang relevan dengan variable yang diteliti dan sebab akibat". Rusiadi (2013:14).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari penggunaan SAP yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Sedangkan data sekunder berdasarkan dari pencatatan kegiatan transaksi yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk peneliti dalam mendokumentasikan data yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.
2. Teknik Observasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengobservasi penelitian untuk mendapatkan data yang objektif dari penelitian.

3. Studi Perpustakaan merupakan salah satu studi yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penelitian ini.
4. Wawancara merupakan salah satu cara peneliti dalam mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada para audiesnya.

4. Hasil

4.1 Analisis

Tabel 4.1 Uji secara Parsial (t)

*S*umber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 28

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	412.625	16.336		25.258	.000
	PAD	-.948	.079	-31.131	-11.936	.000

a. Dependent Variable: belanja modal

Dari uji yang dilakukan secara parsial dapat dilihat bahwa variabel independent secara parsial berpengaruh sifgnifikan sebesar 0,000 terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.5 Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.953[a]	.908	.900	78.38123	.908

a. Predictors: (Constant), PAD

b. Dependent Variable: belanja modal

Dari uji yang dilakukan secara koefisien determinasi dapat dilihat bahwa pengaruh setiap variabel independent terhadap variabel dependen sebesar 90 persen, sisa nya 10 persen dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

2. Pembahasan

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kontribusi pajak daerah tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal, melainkan lebih diarahkan pada pembiayaan belanja operasional dan belanja rutin pemerintah daerah. Setiap peningkatan kontribusi pajak daerah justru diikuti penurunan belanja modal. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Padang (2023) menyatakan bahwa Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan daerah sendiri dan dana penyeimbang sebagian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal, karena pajak daerah lebih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Bapak Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains.

Referensi

Arifah, S., Sari, A. K., & Nst, D. A. D. (2026). The Influence Of Regional Original Revenue On Capital Expenditure In Regencies/Cities Of North Sumatera. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, *5*(1), 303-308.

Faried, A. I., Sos, S., SP, M., & Sos, D. S. S. S. (2017). Keterhubungan pola pengambilan keputusan efektif, struktur dan budaya organisasi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *IRAWAN, SE, M. Si. dan Drs. ANWAR SANUSI, M. Si……..*, *8*

Fred R. David, 2018. Manajemen Strategi. Indeks Gramedia. Jakarta

Hadiyanto, D. W. (2022). Tinjauan atas Penerapan Akuntansi Belanja Barang Selama Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Kota Binjai Tahun 2020 (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

Hasen, dan Mowen, 2016. Management Accounting. Salemba 4. Jakarta.

Hasana, N. A., & Hamdani, G. 2023. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Finansial terhadap Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan, 14(7).

Ismail, Hanif, dan Darsono Prawironegoro, 2019 Sistem Pengendalian Manajemen, konsep dan Aplikasi. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Kaplan, R, S dan Norton, D, P, 2018. Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi. Erlangga. Jakarta.

Maisyarah, R. (2018). Analysis of the determinants competition oligopoly market telecommunication industry in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 760-770.

Made, A., & Ak, C. A. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Studi Di Kantor Dppkad Kabupaten Situbondo).

Mulyadi, 2014. Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yokyakarta.

Mulyadi, 2017. Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan. Edisi kedua. Salemba . Jakarta.

Mahsun, 2018. Metode Penelitian. Duta Wacana University Press. Yogyakarta

Pardede, Pontas M., 2015. Manajemen Operasi dan Produksi: Teori, Model, dan Kebijakan. Edisi Pertama: Andi. Yogyakarta.

Rioni, Y. S. (2020). ANALISIS PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBUATAN NPWP UKM DI KEBUN LADA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT: Yunita Sari Rioni; Teuku Radhifan Syauqi. *Jurnal Perpajakan*, *1*(2), 28-37.

Sari, A. K., & Saputra, H. (2023, December). The Influence of Supply Chain Management on Company Performance (Literature Study). In *International Conference on Sciences Development and Technology* (Vol. 3, No. 1, pp. 88-90).

Sebayang, S. A., Daulay, M. T., Maisyarah, R., Shihab, M. W., & Gulo, A. J. (2025). Impact of energy transformation on economic productivity and environmental sustainability in toba-asahan, indonesia. International Journal of Energy Economics and Policy, 15(1), 180-189.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta.

Sihombing, A., Ranie, Z. A., & Kaputama, K. A. S. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntabilitas Publik Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Wilayah Kota Binjai.

Sedamaryanti, 2018. Manajemen Strategi. Refika Aditama. Bandung.

Watubun, J. S., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (Studi di kantor DPPKAD kabupaten situbondo). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 4(2).